

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2.1.1.1. Definisi Akuntansi

Beberapa ahli dalam bidang akuntansi memberikan definisi yang berbeda-beda, namun definisi yang berbeda-beda tersebut merujuk pada inti dan tujuan yang sama, yaitu merumuskan definisi akuntansi tersebut mudah untuk dipahami.

Definisi akuntansi yang dikemukakan oleh Ibrahim (2016:19) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisisan, dan pelaporan. Akuntansi disebut sebagai proses karena akuntansi memiliki input yang diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output.”

Akuntansi berdasarkan pengertian Hanafi & Halim (2018:27) akuntansi sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Menurut Faisal dan Setiadi (2021:1), *American Accounting Association* mendefinisikan akuntansi adalah: “... suatu proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Sedangkan definisi akuntansi yang diberikan oleh Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountants* (2011:50) adalah sebagai berikut:

“Accounting is an information system that produces financial information to interested parties about the activities and economic conditions of a company.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan yang relevan untuk pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2. Bidang-bidang Akuntansi

Tumbuhnya jenis-jenis khusus dilapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap cabang suatu ilmu sangat terbatas. Berikut bidang-bidang akuntansi menurut V.Wiratna Sujarweni (2016:6) yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*).

2. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/ manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya.
5. Sistem Akuntansi (*accounting system*)
Bidang ini melakukan perencanaan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.
8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*non-profit accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain).
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)
Merupakan salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.”

2.1.1.3. Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah: “... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Menurut Rahman Pura (2013:5) definisi akuntansi pajak adalah: “... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Setiawan (2012:8) pengertian akuntansi perpajakan adalah: “... sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013:8) definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga akan mempermudah dalam menyusun SPT.

2.1.1.4. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11)

sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.1.5. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 Paragraf 07

(2015:2) definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah: “... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Sementara itu, menurut Irham Fahmi (2015:21) pengertian laporan keuangan adalah: “... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Soemarso dalam Suteja (2018:8) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah: “... laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.1.6. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 12-14 (2015:3) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang disusun

untuk tujuan ini, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomik; keputusan ini mungkin mencakup, sebagai contoh, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah: “... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angkat-angka dalam satuan moneter.”

Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

2.1.1.7. Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 08 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.”

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. “Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/ atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perusahaan ekuitas (*statement of financial position*) pada akhir periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statemtn of financial position*) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statemtn*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.“

2.1.1.8. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 24-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

a. “Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

1. Materialitas

Informasi di pandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

1. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

3. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

4. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva

atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

5. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

d. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

4. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu

pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.”

2.1.1.9. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Paragraf 47 (2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.”

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah: “... sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- “Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).

- e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barangbarang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- Aktiva Tetap
- Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:
- a. Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
 - b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
 - c. Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
 - d. Beban yang ditangguhkan (*deferred charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
 - e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

2. Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban atau hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/ jasa yang belum direalisasi.

Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain.”

3. Ekuitas

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019: 62), ekuitas adalah: “... hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan.”

Sedangkan menurut SAK Paragraf 65 (2007: 12), ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas,

setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba awal periode (retained earning), penyajian saldo laba dan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan entitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam perusahaan mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal.

Ekuitas yang dimiliki sebuah entitas umumnya terdiri dari:

1. Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik perusahaan (Wastam Wahyu Hidayat, 2018: 19-20)”

Menurut Sagara (2020), modal untuk pendirian perusahaan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

- “Modal Dasar

Modal dasar (*statutair capital*, nominal/authorized kapital) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) UUPT Tahun 2007, bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni. Mengenai minimal modal dasar (*authorized minimum*), adalah jumlah yang paling rendah yang dibenarkan undang-undang dicantumkan dalam anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT Tahun 2007, modal dasar Perseroan dibenarkan, paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

- Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar.⁹ Berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan.

- Modal Disetor

Modal yang disetor (*gestort kapital*, *paid-up capital*) adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan. Berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT Tahun 2007 paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan juga harus disetorkan pada saat pendirian perseroan terbatas.”

2. Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:20), Agio/ disagio adalah:

“... keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham.”

3. Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:20), laba ditahan

(*Retained Earning*) adalah: “... laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden

(umumnya merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi).”

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38) laporan laba rugi komprehensif yaitu:

“... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha di kurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.”

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38), komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

1. Penghasilan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) Paragraf 06 (2018:4), penghasilan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

2. Beban

Menurut PSAK 01 Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 78 (2015), definisi beban:

“...mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, sebagai contoh, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut

biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya asset seperti kas dan setara kas, persediaan dan asset tetap.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
2. Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya pabrik (Biaya overhead)
3. Laba kotor (*Gross profit*)
Laba kotor (*Gross profit*) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
8. Laba ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

d. Laporan Arus Kas

Sukamulja (2019:40) “Laporan arus kas merupakan laporan yang mencerminkan aliran kas didalam perusahaan seperti arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, laporan ini memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas pada periode tertentu”.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 Tahun 2015, catatan atas laporan keuangan merupakan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi yang sifatnya signifikan atas tiap laporan keuangan seperti laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan dengan catatan atas laporan keuangan yang melengkapinya. Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

2.1.1.10. Metode Akuntansi

Ada berbagai metode akuntansi yang selama ini diakui oleh prinsip akuntansi, misalkan metode depresiasi garis lurus atau saldo menurun untuk mengalokasikan harga perolehan (*cost*) aktiva tetap. Metode FIFO atau LIFO

untuk menentukan harga pokok persediaan. Selain itu ada metode estimasi akuntansi untuk menentukan umur ekonomis, prosentase biaya kerugian, dan penurunan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan. Prinsip akuntansi juga memberi kebebasan kepada penggunanya untuk memilih metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Selain itu, prinsip akuntansi memberi kebebasan untuk mengganti metode akuntansi yang selama ini digunakannya, dengan catatan penggantian metode tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan yang dipublikasikannya.

Tabel 2.1
Metode Akuntansi

Metode Akuntansi	Metode yang bisa dipilih
Depresiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Garis Lurus (<i>straight line</i>) • Saldo Menurun (<i>bouble declining balance</i>) • Jumlah Angka Tahun (<i>sum of the year</i>)
Harga Pokok Persediaan	<ul style="list-style-type: none"> • FIFO (<i>first-in,first-out</i>) • LIFO (<i>last-in,first-out</i>) • Rata-rata (<i>average</i>)

2.1.2 Aset Pajak Tangguhan

2.1.3.1. Definisi Pajak

Menurut Suandy (2016:1) dari segi ekonomi, pajak merupakan: "... pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak

terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.”

Pengertian pajak menurut Pohan (2013:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara,”

Pengertian pajak menurut Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson,

Horace R, Brock dan Moh. Zain (2005) dalam Rahayu (2020:26):

“Tax is any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the privat to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a spesific benefit of equal value in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2.1.3.2. Fungsi Pajak

Menurut Agus Sambodo (2015:7), sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 5 (lima) fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), menurut teori ini dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat-tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi social, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan social di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.
3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat , pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang mudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan m=dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

2.1.3.3. Asas Pengenaan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asa-asa tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki

penduduknya. Adapun asas-asas tersebut dijelaskan oleh Rahayu (2020:45-46)

yaitu :

1. “Asas Domisili
Penaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri, di Indonesia.
2. Asas Sumber
Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.
3. Asas Kebangsaan
Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan penaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Dalam asas ini yang menjadi landasan penaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem penaan pajak berdasarkan kewarganegaraan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kewarganegaraan dengan konsep penaan pajak atas *wold-wide income*.”

2.1.3.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) di Indonesia sendiri Sistem Pemungutan

Pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. “Sistem *Official Assessment*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment*
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2.1.3.5. Penggolongan Jenis Pajak

2.1.3.5.1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Menurut Rahayu (2020:57) istilah yang perlu dipahami dalam membedakan penggolongan jenis pajak berdasarkan pemungutan secara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut :

- a. “*Tax burden* : beban pajak yang dipikul seseorang
- b. *Tax shifting* : proses pelimpahan beban pajak kepada orang lain
 - Forward Shifting : pajak dilimpahkan kepada konsumen
 - Backward Shifting : pajak dilimpahkan ke harga pokok produksi
- c. *Tax incidence* : akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan
- d. *Destinataris* : pihak yang ditunjuk oleh undang-undang pajak untuk memikul beban pajak.”

Dengan pemahaman tersebut maka menurut Rahayu (2020:57-58) dapat dijelaskan perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. “Pajak Langsung

Apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (*no tax shifting*), maka pajak tersebut digolongkan sebagai pajak langsung. Karena tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan tersebut (*tax Incidence*). Dalam hal ini pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk menanggung pajak (*destinataris*) sudah jelas, yaitu karena seseorang atau badan tersebut memiliki sesuatu yang melekat kepada orang atau badan, bukan pada sesuatunya. Pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasar atas surat ketetapan (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu.

2. Pajak Tidak Langsung

Digolongkan ke dalam pajak tidak langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang atau badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Akibat dari pengalihan atau pelimpahan tersebut maka tax incidence pada akhirnya dibebankan sebagian atau seluruhnya pada pihak lain. Pajak yang masuk ke dalam golongan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas kohir dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, misalnya dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu yang menyertainya.”

2.1.3.5.2. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Penggolongan pajak subyektif dan obyektif merupakan pajak yang dilihat dari eratnya hubungan dengan subyek atau obyek pajaknya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rahayu (2020:58-59) yaitu :

1. “Pajak Subyektif

Pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan dari subyek pajak maka digolongkan kedalam pajak subyektif. Pajak ini memberikan focus perhatian pada keadaan wajib pajak, sehingga pada saat menetapkan pajaknya maka diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan wajib pajak.

2. Pajak Obyektif

Apabila pajak erat hubungannya dengan obyek pajak maka digolongkan kedalam pajak obyektif. Besarnya jumlah pajak ditentukan pada keadaan obyek dan tidak dipengaruhi sama sekali oleh keadaan subyek pajak. Obyek dapat berupa sesuatu, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditentukan selanjutnya subyek pajak yang memiliki hukum tertentu hubungan dengan obyek pajak tersebut agar dapat ditunjuk siapa sebagai subyek pajak tersebut”.

2.1.3.5.3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak digolongkan kedalam pajak pusat atau pajak daerah dilihat dari kriteria lembaga atau instansi yang melakukan pemungutan pajak. Apabila yang melakukan administrasi pajaknya adalah Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan maka pajak tersebut digolongkan kedalam jenis pajak pusat. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Bea Materai (BM). Apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah maka digolongkan kedalam pajak daerah. Dibedakan pemungut pajak Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota.

2.1.3.6. Pengertian Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2008:216) mendefinisikan pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak Tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Suandy (2016:99) menyatakan bahwa pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Murhaban (2015:66) menyatakan bahwa pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak tangguhan adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang”.

Dari pengertian menurut para ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang berasal dari perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak akibat perbedaan temporer.

2.1.3.7. Faktor Penyebab Pajak Tangguhan

Antara akuntansi pajak dan keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Karena dasar pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis perhitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan (Timuriana & Muhamad, 2015:15).

Menurut Fadly & Lestiowati (2019:13), perbedaan perlakuan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan (SAK) dengan ketentuan

perpajakan yang digunakan untuk menentukan laba kena pajak atau penghasilan kena pajak mengakibatkan perusahaan harus melakukan koreksi/rekonsiliasi fiskal. Supriyanto (2011:132) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terjadi perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan perusahaan. Perbedaan perlakuan tersebut dikenal dengan beda tetap dan beda temporer (beda waktu).

Menurut PSAK 46, perbedaan permanen/perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. *Permanent difference* atau perbedaan permanen ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. *Permanent difference* atau perbedaan permanen

merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya (Fadly & Lestiowati, 2019:14).

Fadly dan Lestiowati (2019:14) mengatakan, bersifat sementara artinya adalah apabila penghasilan atau biaya yang tidak dapat diakui pada suatu periode, maka penghasilan atau biaya tersebut kemungkinan dapat diakui pada periode selanjutnya. Perbedaan temporer juga dapat berupa perbedaan metode dalam SAK dan ketentuan perpajakan, diantaranya adalah perbedaan metode penyusutan dimana metode garis lurus dan saldo menurun merupakan metode yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan, perbedaan metode persediaan dimana 38 metode rata-rata dan FIFO merupakan metode penelitian yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan, serta penyisihan piutang tak tertagih dimana menurut ketentuan perpajakan penyisihan piutang tak tertagih tidak diperbolehkan kecuali untuk usaha-usaha tertentu sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh dan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Pajak tangguhan yang terdapat pada laporan keuangan dijelaskan dalam tiga hal, yaitu aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan (Aminah dan Zulaikha,2019:3). Berdasarkan PSAK No. 46, selisih antara beban pajak kini dan beban pajak komersil adalah Beban Pajak Tangguhan. Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak. Beban Pajak Komersil adalah jumlah beban pajak yang dihitung oleh wajib pajak dari penghasilan sebelum pajak dalam laporan keuangan komersil dikalikan dengan tarif pajak. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan

terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan.

2.1.3.8. Pengertian Aset Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2017:217), aset pajak tangguhan adalah: "... aktiva yang terjadi apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak."

Menurut PSAK No.46 aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

"Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangi, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), aset pajak tangguhan adalah: "... jumlah pajak terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian."

Dari pengertian aset pajak tangguhan diatas dapat disimpulkan bahwa aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang kemungkinan dapat terpulihkan akibat selisih temporer yang menyebabkan pajak yang dibebankan lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut undang-undang pajak.

2.1.3.9. Faktor Penyebab Aset Pajak Tangguhan

Trisnawati dan Agus (2013:244) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) timbul apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

Menurut Harnato (2013:110) aktiva pajak tangguhan adalah: "... dampak akibat yang terjadi dikarenakan adanya PPh dimasa yang akan datang namun dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat digandakan pada periode yang akan datang. Dampak dari PPh dimasa yang akan datang itu sebaiknya dapat diakui, dihitung, disajikan dan dapat diungkapkan dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan dapat saja membayar pajaknya lebih kecil pada waktu sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan dapat membayar pajak lebih besar sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil dimasa yang akan datang."

Aset pajak tangguhan disebabkan karena terpulihkannya jumlah pajak penghasilan di periode mendatang, sebagai dampak dari perbedaan temporer yang dikurangkan dengan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan dapat dicatat jika terdapat kemungkinan terjadinya realisasi manfaat pajak dimasa mendatang, oleh karena itu diperlukan judgement supaya dapat menaksir realisasi aset pajak tangguhan (Anasta,2015:257). Menurut Suranggane (2007:79) nilai tercatat suatu perusahaan harus diturunkan apabila aset pajak tangguhan tidak lagi

dapat dikompensasi dengan laba fiskal, sehingga penurunan ini harus sesuai dengan besarnya laba fiskal yang terdapat pada perusahaan tersebut.

Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan (Sutadipraja, Ningsih, dan Mardiana,2019:154)

2.1.3.10. Pengukuran Aset Pajak Tangguhan

A. DTA Ratio

Dalam penelitian ini Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) diukur dengan rasio akuntansi menurut GMT Research yang diperoleh dari saldo Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) tahun t dibagi dengan sales (penjualan) tahun t.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$DTA\ ratio = \frac{Deferred\ Tax\ Asset}{Sales}$$

(GMT Research)

Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo,2017:217)

B. APTit

Aktiva pajak tangguhan adalah selisih antara pajak tangguhan pada periode sekarang dengan periode yang telah lalu. Aktiva pajak dapat diukur dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t-1. Hal ini dirumuskan sebagaimana dikatakan oleh Baraja,dkk (2017:199).

$$APTit = \frac{\Delta \text{Aktiva pajak tangguhan } t - 1}{\text{Aktiva pajak tangguhan } t - 1}$$

2.1.3 Leverage

2.1.4.1 Definisi Leverage

Menurut Andrianto,dkk (2019:400) menjelaskan bahwa leverage merupakan: "... alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva."

Menurut Wardhani dan Khoiriyah (2018:28) menyatakan leverage (tingkat pendanaan) merupakan: "... perbandingan yang menggambarkan besarnya kewajiban yang dimiliki perusahaan untuk mendanai seluruh aktivitas operasionalnya."

Kasmir (2016:151) menyatakan bahwa leverage merupakan: "... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang."

Leverage menurut Herispon (2016:40) merupakan: “.. rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya jika suatu saat perusahaan itu terancam dibubarkan.”

Dari berbagai definisi leverage diatas, maka dapat disimpulkan bahwa leverage adalah pengukuran suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutangnya yang dimana digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas operasinya.

2.1.4.2 Tujuan Leverage

Perusahaan memutuskan untuk berhutang kepada pihak ketika semata mata demi memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dengan maksud keberlangsungan bisnis perusahaan itu sendiri. Penggunaan rasio leverage dalam menganalisis laporan keuangan bagi manajemen perusahaan sangat berguna untuk persiapan menghadapi ketidakpastian risiko. Berikut tujuan dari Leverage menurut Kasmir (2016:153), yakni:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktivakhususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.”

2.1.4.3 Macam-macam Pengukuran Leverage

Pada rasio leverage ini terdapat beberapa rasio yang digunakan sebagai indikator pengukur leverage berdasarkan yang dijelaskan oleh Kasmir dalam bukunya (2016:155) yaitu :

a. *“Debt to asset ratio / Debt ratio*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari Debt to Equity Ratio dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari Long Term Debt to Equity Ratio adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

d. *Time Interest Earned*

Time Interest Earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu

karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Rumus untuk mencari Time Interest Earned dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

Atau

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga}}$$

e. *Fixed Charge Coverage*

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai Time Interest Earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Rumusan untuk mencari Fixed Charge Coverage adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

2.1.4.4 Metode Pengukuran Leverage

Untuk penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan proksi Debt to Assets Ratio (DAR). Dimana proksi ini merupakan salah satu dari rasio leverage yang membandingkan antara Total Hutang dengan Total Aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total Aset dipilih sebagai pembanding karena Total Aset dinilai lebih stabil dibandingkan dengan Total Equity. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi menurunkan kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Karena ketika tingkat leverage tinggi, maka tinggi pula beban pinjaman yang dimiliki perusahaan sebagai pengurang laba sebelum kena pajak, yang artinya berkurang pula beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Stawati, 2020:15).

Berikut rumus perhitungan rasio leverage menurut Herispon (2016:40) berdasarkan proksi Debt to Assets Ratio (DAR):

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Definisi Manajemen

Menurut Afandi (2018:1) manajemen adalah: “ ... proses kerja sama antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif.”

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2016:9) mengemukakan bahwa manajemen laba adalah: “... ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Dari definisi diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengawasi segala aktivitas kerja agar mencapai hasil yang diinginkan dan bertujuan untuk pencapaian visi dan misi bersama.

2.1.5.2 Definisi Laba

Menurut (PSAK No.46, 2018) yaitu laba akuntansi adalah laba bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Menurut (Ardhianto, 2019:100) “Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau *net earning*.”

2.1.5.3 Definisi Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2018:6) definisi manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan”.

Menurut Wirakusuma (2016) manajemen laba adalah: “... suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu”.

Menurut Fahmi (2014:321) manajemen laba merupakan: “... suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*)”.

Menurut Dwi Martani (2012:113) definisi manajemen laba sebagai berikut:

“Manajemen laba merupakan tindakan yang mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan di standar akuntansi. Biasanya manajemen laba dilakukan dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target laba tertentu dan juga dalam bentuk

menurunkan laba di periode ini, agar dapat menaikkan pendapatan di periode mendatang”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah suatu penyusunan laporan keuangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen yang ditunjukkan kepada pihak eksternal dengan cara memmeratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya dan untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

2.1.5.4 Motivasi Manajemen Laba

Secara konseptual ada tiga jenis hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2018:55):

1. “Bonus plan hypothesis Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial.
2. Debt (equity) hypothesis Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara hutang dan ekuitas lebih besar cenderung akan memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa manajer cenderung melanggar perjanjian hutang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya.
3. Political cost hypothesis Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mengecilkan atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya”.

2.1.5.5 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scott (2015:447) adalah sebagai berikut:

1. *“Taking a bath*
 Pola ini biasanya terjadi pada periode dimana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi (*organization stress*) atau melakukan restrukturisasi. Pola taking a bath adalah praktik manajemen laba dengan menghapus asset-aset yang menimbulkan biaya di masa depan. Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi atau sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan. Pada perusahaan yang baru mengalami pergantian pimpinan perusahaan, jika perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sehingga harus melaporkan kerugian, manajer baru cenderung bersemangat melaporkan kerugian dalam jumlah yang sangat ekstrem agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target.
2. *Income minimization*
 Manajemen laba dilakukan dengan penghapusan asset kapital dan asset tak berwujud, serta membebankan pengeluaran R&D. salah satu pertimbangan dalam menurunkan laba adalah peraturan pajak dan motivasi public. Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Secara praktis, pola ini relative sering dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui penghapusan asset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. Hal ini juga dilakukan untuk motivasi politis. Agar tidak menjadi pusat perhatian yang akan menimbulkan biaya politis yang tinggi, manajer seringkali memilih untuk melaporkan laba yang rendah dari laba yang seharusnya. Demi menjaga konsistensi bantuan, subsidi, atau risiko diprivatisasi, manajer cenderung menurunkan laba karena khawatir jika kinerja baik, sahamnya akan dijual atau tidak mendapatkan bantuan.
3. *Income maximation* Praktik manajemen laba ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan perolehan bonus dan menghindari risiko pelanggaran perjanjian utang. Pemberian bonus berdasarkan besarnya laba akan mendorong manajer untuk memaksimalkan laba. Pola ini merupakan kebalikan dari pola income minimization. Menurut pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang dilakukannya beragam, mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan meningkatkan jumlah penjualan

dan produksi. Pola ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat kepercayaan dari kreditor. Hampir semua perusahaan go public meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka.

4. Income smoothing Ada berbagai alasan yang mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba ini. Dilihat dari segi kompensasi, manajer yang tidak menyukai risiko mungkin melakukan income smoothing untuk mendapatkan kompensasi yang relative konstan. Dilihat dari segi perjanjian utang, income smoothing dilakukan untuk mengurangi ketidakstabilan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap perjanjian utang. Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan relative stabil. Untuk investor dan kreditor yang memiliki sifat risk adverse, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia keuangan, fluktuasi harga saham atau fluktuasi laba merupakan indikator risiko. Demi menjaga agar laba tidak fluktuatif stabilitasnya harus dijaga. Stabilitas lab aini dapat diperoleh dengan mengombinasikan dua pola tersebut, yaitu meminimalkan atau memaksimalkan laba. Namun, tentunya harus mengikuti tren laba yang akan dilaporkan agar terlihat stabil. Income smoothing dapat dikatakan merupakan upaya untuk menetralkan keadaan lingkungan uang yang penuh dengan ketidakpastian.”

2.1.5.6 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2018:30) ada empat cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba, yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapat periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada pendapatan sesungguhnya.
2. Mencatat pendapatan palsu Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada pendapatan sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang, yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapanpun. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi

investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.

3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat Upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (management buyout), mengecilkkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban Upaya ini dapat dilakukan manajer menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya, sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Sebagai contoh adalah kewajiban berupa hutang yang disembunyikan perusahaan. Menurunnya kewajiban berupa hutang ini akan membuat biaya bunga periode berjalan menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya, sehingga laba periode berjalan pun akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya.”

2.1.5.7 Pendekatan Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dilakukan dengan menggunakan pendekatan accrual. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (*accrual based measures*) dalam mendeteksi adanya manipulasi.

Ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2018:185) yaitu:

1. “Model berbasis *aggregate accrual model* pertama merupakan model yang berbasis *aggregate accrual*, yaitu model yang digunakan untuk

mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba.

2. Model berbasis *specific accruals model* kedua merupakan model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industry asuransi.
3. Model berbasis *distribution of earnings after management*
Sementara model *distribution of earnings* dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar benchmark yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah incidence jumlah yang berada di atas maupun di bawah benchmark telah didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat.”

2.1.5.8 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2018:189) model empiris untuk mendeteksi manajemen laba terdapat empat model yaitu Model Healy, Model De Angelo, Model Jones dan Model Jones Dimodifikasi. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. “Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (TAC) yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

Langkah I : Mengitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II : Menghitung nilai nondiscretionary accruals (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_{it} = \frac{\sum TA}{T}$$

Keterangan :

NDA= *Nondiscretionary Accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1.

T = 1, 2,T merupakan tahun subscript untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

T = Tahun subscript yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi

Langkah III : Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Dimana :

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi

TAC_t = Total akrual periode t

$TAt-1$ = Total aktiva periode t-1

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991) ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Langkah II: Dari persamaan regresi diatas, NDA (*non discretionary*) dapat dihitung dengan memasukan kembali koefisien-koefisien beta (β) yaitu sebagai berikut:

Nilai Total *accruals* diestimasi dengan menggunakan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Keterangan:

$TAC_{i,t}$ = Total akrual perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aset untuk perusahaan I periode t-1

$REV_{i,t}$ = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap perusahaan i periode t

Selain itu menghitung nondiscretionary accruals model (NDA) adalah sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rect_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}$$

Keterangan:

ΔREV_t = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan i periode t

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ = *Firm-specific parameters*

Langkah III : Menghitung nilai discretionary accruals (TAC) dan nondiscretionary accruals (NDA). Discretionary accruals merupakan proksi manajemen laba.

4. Model Jones Dimodifikasi

Model jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model jones untuk menentukan discretionary accruals. Ketika discretion melebihi pendapatan.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from$$

Langkah II : Menghitung nilai current accruals yang merupakan selisih antara perubahan (Δ) aktiva lancar (current assets) dikurangi kas dengan perubahan (Δ) hutang lancar (current liabilities) dikurangi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo (current maturity of long-term debt).

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Keterangan:

$TAC_{i,t}$ = Total akrual perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aset untuk perusahaan I periode t-1

$REV_{i,t}$ = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap perusahaan i periode t

Langkah III : Menghitung nilai nondiscretionary accruals total accruals (NDA)

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rect_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}$$

Keterangan :

$NDCA_{it}$ = Nondiscretionary accruals perusahaan I periode t

ΔTR_{it} = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan I periode t.

b = fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total akrual

Langkah IV : Menghitung nilai discretionary current accruals, yaitu discretionary accruals yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$$

Menurut Sulistyanto (2008:165) secara empiris nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif, atau negative. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangan. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan peralatan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa

manajemen laba dilakukan dengan pola kenaikan laba (*income increasing*) dan nilai negative menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Discretionary Accruals merupakan komponen akrual yang timbul dari diskresi/keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.

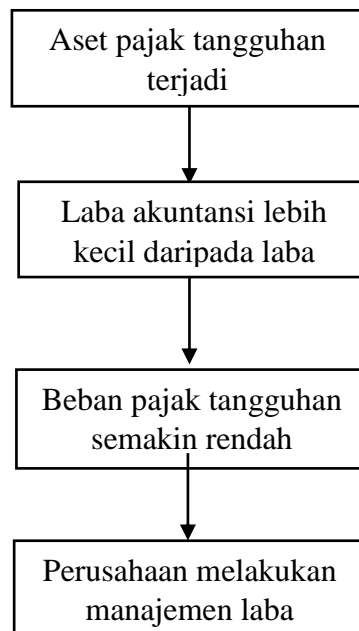
2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan terjadi karena adanya koreksi positif yang mengakibatkan laba perusahaan atau laba komersial lebih kecil dibandingkan dengan laba menurut fiskal. Sehingga perusahaan membayar pajak periode tertentu lebih besar daripada pembayaran pajak periode mendatang. Karena pembayaran pajak periode mendatang lebih kecil atau lebih hemat berarti laba perusahaan yang dilaporkan akan menjadi lebih besar (Achyani dan Lestari 2019). Aset Pajak Tangguhan terjadi apabila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang. (Suranggane 2007)

Hasil penelitian yang dilakukan Suranggane (2007), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Apabila aset pajak tangguhan mengalami kenaikan maka manajemen laba pun akan mengalami kenaikan.

Kerangka pemikiran Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

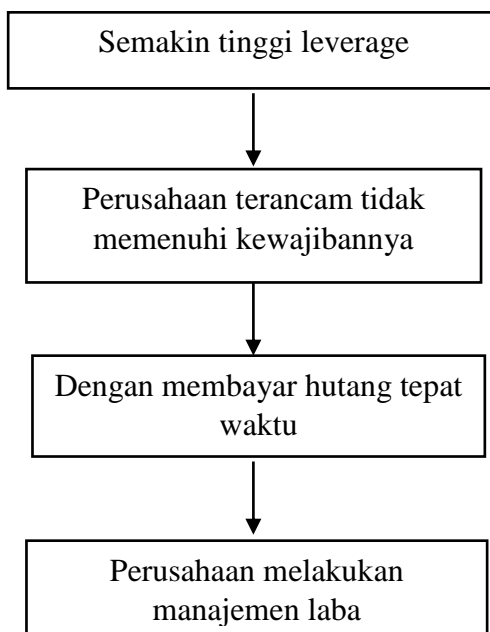
2.2.2. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau likuidasi (Kasmir, 2012:151 dalam Cahyadi et al, 2018).

Menurut Yamaditya (2014) menyatakan bahwa : “Leverage mempunyai hubungan dengan praktek manajemen laba, ketika perusahaan mempunyai rasio leverage yang tinggi maka perusahaan cenderung akan melakukan manajemen

laba karena perusahaan terancam tidak bisa membayar kewajibannya dengan membayar hutangnya tepat waktu”.

Kerangka Pemikiran Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Leverage Terhadap Manajemen Laba

2.3 Hipotesis

Menurut Sugioyono (2017:64) menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiric.”

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dibutuhkan pengujian hipotesis untuk mengetahui adanya pengaruh keterkaitan antara variabel independent dengan variabel dependen. Maka diasumsikan jawaban sementara penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba
- H2 : Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba
- H3 : Aset pajak tangguhan dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang akan diteliti. Di dalam melakukan penelitian pastinya menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan apa yang akan diteliti. Menurut Siyoto dan Sodik (2015: 99) menjelaskan bahwa: "... metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data."

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono dalam Siyoto dan Sodik (2015:17) menjelaskan metode kuantitatif adalah: "... metode penelitian kuantitatif merupakan Teknik penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu."

Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik (2015:17) sendiri mengatakan bahwa:

"Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu macam penelitian yang bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Pada dasarnya penelitian ini menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penelitian dari hasilnya."

Sementara menurut Siyoto dan Sodik (2015:111) menyatakan pendekatan deskriptif sebagai statistic deskriptif yang berarti:

"Statistic deskriptif adalah metode yang dipakai untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan informasi berupa data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi atau umum."

Dalam penelitian pendekatan deskripsi akan digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan aset pajak tangguhan dan leverage. Penelitian dengan metode kuantitatif ini digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis melalui pengaruh aset pajak tangguhan, dan leverage, terhadap manajemen laba pada Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu materi yang akan diteliti, dikaji, dan dianalisis hubungannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah aset pajak tangguhan dan leverage, sebagai variabel independent serta manajemen laba sebagai variabel dependen.

3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi

3.3.1. Unit Analisis

Unit Analisis untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan sektor properti real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021.

3.3.2. Unit Observasi

Unit Observasi untuk penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan tahunan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi tahun 2016-2021.

Data-data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan catatan atas laporan keuangan:

1. Adapun data yang diperoleh dari laporan posisi keuangan konsolidasian yang meliputi total aset, total hutang, aset tetap.
2. Adapun data yang diperoleh dari laporan laba rugi meliputi sales, laba bersih tahun berjalan, laba sebelum pajak dan beban pajak

3.4 Definisi Variable dan Operasionalisasi Variable Penelitian

3.4.1. Definisi Variable Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis terlebih dahulu menetapkan dengan jelas variabelnya sebelum memulai pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2018:57) variabel penelitian adalah: “... segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditentukan oleh seorang penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Menurut Siyoto dan Sodik (2015:49) variable penelitian adalah: “... objek yang menjadi fokus penelitian, dalam kata lain variabel merupakan suatu factor penting yang berperan dalam penelitian. Komponen yang dimaksud penting dalam menarik kesimpulan atau konklusi suatu penelitian.”

Berdasarkan judul penelitian yang diambil, penulis menggunakan variable bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*), masing-masing variable didefinisikan dan dibuat operasionalisasi variabelnya berdasarkan indikator ukuran dan skala pengukuran yang diuraikan sebagaimana berikut:

3.4.1.1. Variable Independen (Variable Bebas)

Menurut Sugiyono (2018:39) variable independen sebagai berikut:

“Variable independen adalah variable yang sering juga disebut sebagai variable prediktor, stimulus dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia variable independen disebut juga variable bebas. Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau imbulnya variable terikat (dependen).”

Variable independen yang diteliti dalam penelitian ini ada 2 variabel yakni Aset Pajak Tangguhan dan Leverage.

1. Aset Pajak Tangguhan (X1)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi *Deferred Tax Asset* menurut Waluyo (2008:217) yang menyatakan aset pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak.

Adapun untuk pengukuran *Deferred Tax Asset* penulis menggunakan Accounting Ratio menurut GMT Research sebagai berikut:

$$DTA \text{ ratio} = \frac{\text{Deferred Tax Asset}}{\text{Sales}}$$

Aset Pajak Tangguhan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo,2008:217).

Menurut GMT Research secara umum saldo Aset Pajak Tangguhan memiliki saldo yang relatif kecil biasanya kurang dari 2% dari sales. Dikatakan sangat tinggi/sangat tidak baik jika rasionya melebihi 4%

3. Leverage (X3)

Menurut Kasmir (2016:151) menyatakan bahwa leverage merupakan: "... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang."

Menurut Kasmir (2008:156) dalam Utami (2021), *leverage* dapat diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR) dengan perbandingan antara total hutang dengan total aset, yakni sebagai berikut :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan :

DAR = *Debt Asset to Ratio*

Menurut Kasmir (2016:164) perusahaan akan dikatakan baik jika perusahaan mampu mencapai rata-rata rasio hutang terhadap total aktiva dibawah rata-rata industri. Rata-rata rasio hutang terhadap total aktiva untuk industri adalah 35%.

3.4.1.2. Variable Dependen (Variable Terikat)

Variable dependen sering disebut sebagai variable output, kriteria konsekuen. Variable dependen ini disebut juga variable terikat. Menurut Sugiyono (2018:39) variable dependen adalah: "... variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas".

Dalam penelitian ini variable dependen yang digunakan oleh penulis adalah Manajemen Laba. Pengertian Manajemen Laba yang dikemukakan oleh (Dwi, 2012 dalam (Fadhilatul,2018)), adalah “...tindakan yang mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan. Biasanya manajemen laba dilakukan dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target laba dan juga dalam bentuk menurunkan laba di periode ini, agar dapat menaikkan pendapatan di periode mendatang”.

Penelitian ini menggunakan indikator Modified Jones Model menurut Dechow et al, (1995) dalam Fatchan & Susi, (2019) diproksi dengan *discretionary accrual* dan dihitung dengan modified jones model. Pengukuran *discretionary accrual* dilakukan dengan:

➤ Langkah I

Menghitung Total *accruals* perusahaan i pada periode t menggunakan rumus:

$$TAC_{it} = Nit - CFO_{it}$$

Nilai Total *accruals* diestimasi dengan menggunakan regresi linear berganda sebaga berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Keterangan :

$TAC_{i,t}$ = Total akrual perusahaan i periode t

$TAC_{i,t-1}$ = Total aset untuk perusahaan I periode t-1

$Sales_{i,t}$ = perubahan penjualan perusahaan I periode t

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap perusahaan I periode t

➤ Langkah II

Dari persamaan regresi diatas, NDA (*non discretionary*) dapat dihitung dengan memasukan kembali koefisien-koefisien beta (β) yaitu sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rect_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}$$

Keterangan :

$NDA_{i,t}$ = *Nondiscretionary accrual* pada tahun t

$TR_{i,t}$ = perubahan piutang dagang perusahaan i periode t

B = *fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total akrual

➤ Langkah III

Selanjutnya dapat dihitung nilai *discretionary accruals* sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

3.4.2. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variable diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variable-variable yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga untuk memastikan skala pengukuran dari tiap-tiap variable sehingga pengujian hipotesis dengan memakai alat bantu statistik bisa dilakukan secara benar. Operasionalisasi variable independen dalam penelitian ini:

1. Aset Pajak Tangguhan (X2)
2. Leverage (X3)
3. Manajemen Laba (Y)

Untuk lebih memahami penelitian yang ditulis dapat dilihat dalam tabel

3.1. sebagaimana berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variable

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Aset Pajak Tangguhan (X1)	Deferred Tax Asset menurut Waluyo (2008:217) yang menyatakan aset pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak.	$DTA\ ratio = \frac{Deferred\ Tax\ Asset}{Sales}$ <p>Menurut GMT Research secara umum saldo Aset Pajak Tangguhan memiliki saldo yang relatif kecil biasanya kurang dari 2% dari sales. Dikatakan sangat tinggi/sangat tidak baik jika rasionya melebihi 4%</p>	Rasio
Leverage (X2)	<p>“Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset”</p> <p>Irham Fahmi (2020:131)</p>	$DAR = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset} \times 100\%$ <p>Keterangan : DAR = Debt Asset to Rasio</p> <p>Irham Fahmi (2020:132)</p> <p>Menurut Kasmir (2016:164) perusahaan akan dikatakan baik jika perusahaan mampu mencapai rata-rata rasio hutang terhadap total aktiva dibawah rata-rata industri. Rata-rata rasio hutang terhadap total aktiva untuk industri adalah 35%.</p>	Rasio
Manajemen Laba (Y)	Manajemen laba merupakan perilaku oportunitis seorang manajer untuk memainkan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Manajer akan bermain-main dengan	$DTA_{it} = \left(\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} \right) - NDA_{it}$ <p>Dengan kriteria: Menurut Sulistiyanto (2008:226), Jika nilai DTA > 0 maka</p>	Rasio

	komponen akrual yang discretionary untuk menentukan besar kecilnya laba, sebab standar akuntansi memang menyediakan berbagai alternatif metode dan prosedur yang bisa dimanfaatkan Sulistiyanto (2008:4)	perusahaan melakukan manajemen laba sedangkan jika $DTA \leq 0$ maka tidak melakukan manajemen laba	
--	---	---	--

Sumber: Data yang diolah penulis dari beberapa sumber (2022)

3.5 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah: "...wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang memiliki mutu serta ciri tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Berdasarkan definisi diatas, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 36 perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2021.

Tabel 3.2
Daftar Populasi Perusahaan Sub Sektor Makanan, Minuman dan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi populasi penelitian

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2.	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
3.	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
4.	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
5.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
6.	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
7.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
8.	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
9.	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
10.	GOOD	Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk
11.	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
12.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13.	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk
14.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
15.	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.
16.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
17.	MYOR	Mayora Indah Tbk
18.	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
19.	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
20.	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
21.	PSGO	Palma Serasih Tbk
22.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
23.	SKBM	Sekar Bumi Tbk
24.	SKLT	Sekar Laut Tbk
25.	STTP	Siantar Top Tbk
26.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
27.	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
28.	INAF	Indofarma Tbk.
29.	KAEF	Kimia Farma Tbk
30.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
31.	MERK	Merck Indonesia Tbk
32.	PEHA	Phapros Tbk

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
33.	PYFA	Pyridam Farma Tbk
34.	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
35.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
36.	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk

Sumber : www.sahamok.com

3.6 Sample dan Teknik Sampling

3.6.1. Sampel

Menurut Sugiyono (2018:131) sampel adalah: "... bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut." Sehingga sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul memiliki sifat *representative* (mewakili), artinya sampel yang ada harus mewakili populasi atau segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel terpilih adalah perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021 dan memiliki kriteria tertentu yang mendukung penelitian ini.

Menurut Gay dan Diehl (1992:146), ukuran sampel penelitian yang dibutuhkan untuk penelitan deskriptif sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total elemen populasi.

3.6.2. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) teknik sampling adalah: “...teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan”. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:84) *Non Probability Sampling* adalah: “...teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Sedangkan *purposive sampling* menurut Sugiyono (2016:136) adalah: “... teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.” Sedangkan teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:138).

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai yang telah ditentukan oleh penulis. Oleh karena itu, sampel yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif, artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang lengkap secara berturut-turut pada tahun 2016-2021 di Bursa Efek Indonesia
2. Perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang tidak mengalami kerugian secara berturut-turut pada periode 2016-2021 di Bursa Efek Indonesia.
3. Perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang tidak menggunakan mata uang rupiah pada periode 2016-2021 di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 3.3
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
	Jumlah populasi awal (Perusahaan Sub Sektor Makanan, Minuman dan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2021)	36
1.	Tidak memenuhi kriteria 1: Perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan keuangan yang lengkap secara berturut-turut pada tahun 2016-2021 di Bursa Efek Indonesia	(13)
2.	Tidak memenuhi kriteria 2: Perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang mengalami kerugian secara berturut-turut pada periode 2016-2021 di Bursa Efek Indonesia.	(8)
3.	Tidak memenuhi kriteria 3 : Perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi	(1)

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
	yang menggunakan mata uang dollar pada periode 2016-2021 di Bursa Efek Indonesia.	
	Jumlah Sampel Penelitian	14
	Periode Penelitian	6 tahun
	Jumlah Sample Penelitian	14 x 6 = 84

Sumber: data diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan kriteria pada tabel 3.3 dihasilkan 14 perusahaan sebagai sampel penelitian berikut ini nama-nama perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 yang telah memenuhi kriteria dan terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan *purposive sampling* yang mendukung penelitian dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Daftar Perusahaan Sub Sektor Makanan, Minuman dan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
2	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
3	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
4	MYOR	Mayora Indonesia Tbk
5	SKBM	Sekar Bumi Tbk
6	SKLT	Sekar Laut Tbk
7	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
8	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
9	KAEF	Kimia Farma Tbk
10	KLBF	Kalbe Farma Tbk
11	MERK	Merck Indonesia Tbk

12	PEHA	Phapros Tbk
13	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
14	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk

Sumber: Data diolah penulis

3.7 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.7.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Menurut Sugiyono (2018: 213) yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah:

“... sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini”.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor makanan, minuman dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Data tersebut diperoleh dari masing-masing *website* resmi perusahaan dan *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu yang diperoleh dari www.idx.co.id.

3.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mendukung penelitian ini, penulis membutuhkan sejumlah data baik data dari dalam maupun luar perusahaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yakni cara pengumpulan data berupa dokumen yang terkait dengan

objek yang diteliti. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dokumen yang diperlukan berupa laporan keuangan tahunan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan didapat dari www.idx.co.id dan lain sebagainya. Selain teknik tersebut, peneliti juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau sering disebut sebagai *library research (online research)*. Biasanya teknik ini mengumpulkan data-data dari sumber-sumber pustaka yang dapat mendukung penelitian ini.

3.8 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018: 226) menjelaskan mengenai analisis data adalah sebagaimana berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis reponden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langka terakhir tidak dilakukan”.

Dalam menentukan data diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang dapat digunakan dalam penelitan yang dilakukan oleh penulis untuk menarik kesimpulan. Saat menganalisis data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan, penulis melakukan perhitungan, pengolahan dan penganalisaan dengan bantuan program *IBM Statistics Product and Service Solution (SPSS)* sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

3.8.1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018: 226) statistik deskriptif adalah: "... statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diamati. Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis variabel Aset Pajak Tangguhan dan leverage sebagai variabel independen dan variabel manajemen laba sebagai variabel dependen. Diantara analisis deskriptif adalah rata-rata hitung.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis aset pajak tangguhan, leverage dan manajemen laba dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Aset Pajak Tangguhan

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut dapat dibuat tabel distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Mencari total *Deferred Tax Asset*
- b. Mencari total sales
- c. Menghitung aset pajak tangguhan dengan menggunakan rumus DTA ratio , yaitu dengan cara *Deferred Tax Asset* dibagi dengan sales

- d. Menetapkan kriteria perusahaan-perusahaan yang diduga menerapkan aset pajak tangguhan

Menurut GMT Research secara umum saldo aset pajak tangguhan memiliki saldo yang relatif kecil biasanya kurang dari 2% dari sales. Dikatakan sangat tinggi/sangat tidak baik jika rasionya melebihi 4%

- e. Membuat kesimpulan dengan membandingkan rasio aset pajak tangguhan dengan kriteria penilaian.

Tabel 3.5
Kriteria Penilaian Aset Pajak Tangguhan

Kriteria	Interval
$DTA \text{ Ratio} \geq 4,01 \%$	Sangat Tidak Baik
$3,01\% \leq DTA \text{ Ratio} < 4,00 \%$	Kurang Baik
$2,01\% \leq DTA \text{ Ratio} < 3,00 \%$	Cukup Baik
$1,01 \% \leq DTA \text{ Ratio} < 2,00 \%$	Baik
$DTA \text{ Ratio} < 1,00 \%$	Sangat Baik

Sumber: data diolah penulis (2022)

2. Leverage

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut dapat dibuat tabel distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan Total Aset yang dimiliki perusahaan sektor barang konsumsi di bursa Efek Indonesia sesuai tahun pengamatan;
- b. Menentukan Total Hutang yang dimiliki Perusahaan sektor barang konsumsi di bursa Efek Indonesia sesuai tahun pengamatan;
- c. Menghitung Rasio Leverage menggunakan rumus Debt to Assets Return dengan rumus Total hutang dibagi Total Aset dikali seratus persen;
- d. Menentukan mean hasil nilai leverage Perusahaan sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia sesuai tahun pengamatan;
- e. Menetapkan jumlah kriteria yaitu lima kriteria diantaranya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi seperti table 3.6
- f. Membandingkan DAR dengan kriteria leverage
- g. Membuat kriteria kesimpulan

Menurut Kasmir (2016:164) perusahaan akan dikatakan baik jika perusahaan mampu mencapai rata-rata rasio hutang terhadap total aktiva dibawah rata-rata industri. Rata-rata rasio hutang terhadap total aktiva untuk industri adalah 35%.

Tabel 3.6
Standar Indsutri Rasio *Leverage*

Nilai DAR	Kriteria Penilaian
$DAR \geq 46,67\%$	Sangat Tinggi
$35,00\% \leq DAR < 46,67\%$	Tinggi
$23,33\% \leq DAR < 35,00\%$	Sedang
$11,66\% \leq DAR < 23,33\%$	Rendah
$DAR < 11,66\%$	Sangat Rendah

Sumber: Kasmir (2016:164), data diolah kembali penulis

3. Manajemen Laba

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut dapat dibuat tabel distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-langaknya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan *total accruals* (TAC) dalam hal ini penulis memperoleh data dari laporan arus kas dan laporan laba rugi.
- b. Menentukan total aset dan aset tetap dalam hal ini data diperoleh dari laporan posisi keuangan.
- c. Menentukan penjualan dalam hal ini data diperoleh laporan laba rugi.
- d. Menentukan *Discretionary Accruals* (DTA) dengan membagi total akrual tahun t dengan total aktiva tahun t-1 lalu dikurangi dengan *Non Discretionary Accruals* (NDTA).
- e. Menentukan mean manajemen laba dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi dengan jumlah tahun.
- f. Menentukan kriteria penilaian manajemen laba

Menurut Sulistyanto (2008:226), jika nilai $DTA > 0$ maka perusahaan melakukan manajemen laba sedangkan jika $DTA \leq 0$ maka tidak melakukan manajemen laba

Tabel 3.7
Kriteria Manajemen Laba

Nilai Manajemen Laba	Kriteria
----------------------	----------

$DTA \leq 0$	Tidak melakukan manajemen laba
$DTA > 0$	Melakukan manajemen laba

Sumber: Sulistiyanto (2008:226)

- g. Menarik kriteria kesimpulan dalam tabel 3.8

Tabel 3.8
Kriteria Kesimpulan Manajemen Laba

Jumlah Perusahaan	Kriteria
14	Seluruh perusahaan melakukan manajemen laba
9-13	Sebagian besar perusahaan melakukan manajemen laba
5-8	Sebagian perusahaan melakukan manajemen laba
1-4	Sebagian kecil perusahaan melakukan manajemen laba
0	Tidak ada perusahaan yang melakukan manajemen laba

Sumber: Diolah oleh penulis

3.8.2. Analisis Asosiatif

Analisis asosiatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Menurut Sugiyono (2018: 36) penelitian asosiatif adalah: "... suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih". Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh aset pajak tangguhan dan leverage terhadap manajemen laba.

3.8.2.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, sesuai dengan ketentuan bahwa dalam uji regresi linear harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar penelitian tidak bias dan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolimeritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel independen dan variabel dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan *IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

Uji normalitas data dilakukan menggunakan *Test Normality Kolmogrov-Smirnov*, menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Menurut Ghozali (2016:134) ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi yaitu metode *chart* (diagram *scatterplot*) dan uji statistik (uji *glejser*). Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode *chart* atau diagram *scatterplot*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *chart* atau diagram *scatterplot*. Dasar analisis ini dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan residual (SRESID).

Dasar pengambilan keputusan metode *chart* (diagram *scatterplot*) menurut Ghozali (2016:137-138) adalah sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan dalam uji *glejser*, apabila variabel independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Hal tersebut diamati dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016: 138).

c. Uji Autokorelasi

Menurut Winarno (2015:29) autokorelasi adalah "... hubungan antara residual satu dengan residual observasi lainnya. Salah satu asumsi dalam penggunaan model OLS (*Ordinary Least Square*) adalah tidak ada autokorelasi yang dinyatakan $E(e_i, e_j) = 0$ dari $i \neq j$ sedangkan apabila ada autokorelasi maka dilambangkan $E(e_i, e_j) \neq 0$ dan $i \neq j$.

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi dirancang untuk menguji apakah dalam satu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan

satu sama lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen (Ghozali, 2016: 108). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* dalam Winarno (2015:531) yang menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan. Kriteria uji Durbin Watson dijelaskan dalam tabel 3.9

Tabel 3.9
Uji Durbin Watson

Nilai Statistik d	Hasil
Dw dibawah -2	Terjadi autokorelasi positif
Dw diantara -2 dan +2	Tidak terjadi autokorelasi
Dw diatas +2	Terjadi autokorelasi negatif

Sumber: Winarno (2015:531)

3.8.2.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variable dependen. Dengan pengujian hipotesis ini, penulis menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variable dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan

bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2016:93), pengertian hipotesis adalah:

“... jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dan bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori-teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Menurut Danang Sunyoto (2016:29) tujuan uji hipotesis:

"Tujuan uji beda atau uji hipotesis ini adalah menguji harga-harga statistik, mean dan proporsi dari satu atau dua sampel yang diteliti. Pengujian ini dinyatakan hipotesis yang saling berlawanan yaitu apakah hipotesis awal (nihil) diterima atau ditolak. Dilakukan pengujian harga harga statistik dari suatu sampel karena hipotesis tersebut bisa merupakan pernyataan benar atau pernyataan salah.”

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan pengujian hipotesis ini penulis menggunakan uji signifikan dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

3.8.2.2.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan dalam pengujian hipotesis ini peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Menurut Imam Ghozali (2013:98), uji t digunakan untuk:

“Menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen”.

Adapun rancangan-rancangan pengujian hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

Tabel 3.10
Rumusan Hipotesis (Uji t)

$H_01 (\beta_1 = 0)$	Aset Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
$H_a1 (\beta_1 \neq 0)$	Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
$H_02 (\beta_2 = 0)$	Leverage tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
$H_a2 (\beta_2 \neq 0)$	Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Pengujian tersebut menunjukkan sejauh mana variabel independen (X) secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Y).

Menurut Sugiyono (2018:187) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai uji t

r : Nilai Koefisien Korelasi

r^2 : Nilai Koefisien Determinasi

n : Jumlah Data

2. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan *alpha* 5% (0,05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini telah menentukan risiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%.

3. Pengambilan Keputusan

a. Uji Kriteria t_{hitung} bernilai positif:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)

b. Uji Kriteria t_{hitung} bernilai negatif:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)

Apabila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sebaliknya, apabila H_0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

3.8.2.2.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ferdinand (2014:239), uji f digunakan untuk melihat apakah model regresi yang ada layak atau tidak layak. Layak artinya model regresi yang ada dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji f adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

Tabel 3.11
Rumus Hipotesis (Uji f)

H01 ($\beta_1 = \beta_2 = 0$):	Tidak terdapat pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Leverage terhadap Manajemen Laba
Ha1 ($\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$):	Terdapat pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Leverage terhadap Manajemen Laba

2. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% (0,05). Artinya, penelitian ini memiliki profitabilitas 95% atau toleransi risiko kesalahan dalam menolak atau menerima hipotesis yang benar hingga 5%.

Uji statistik f disebut juga uji signifikan individual. Pengujian tersebut menunjukkan sejauh mana variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2018:187), rumus uji f adalah sebagai berikut:

$$F_h = \frac{r^2/k}{(1-r^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

F_h : Nilai uji f

r^2 : Nilai Koefisien Korelasi Berganda

n : Jumlah Anggota Sample

3. Pengambilan keputusan

a. Uji kriteria fhitung bernilai positif:

- Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh signifikan).
- Jika $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh signifikan).

b. Uji kriteria fhitung bernilai negatif:

- Jika $f_{hitung} \geq f_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a diterima (tidak berpengaruh signifikan).
- Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a ditolak (berpengaruh signifikan).

Apabila H_0 diterima, artinya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Dan sebaliknya, apabila H_0 ditolak, artinya variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

3.8.2.3. Uji Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedua variabel, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel dependen, nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Dengan menggunakan uji regresi linier sederhana maka akan mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang diperkirakan dilakukan dengan rumus regresi linier sederhana (Sugiyono, 2009:204), yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Nilai prediksi dari Y

a = bilangan konstanta

b = koefisien variabel bebas

X = variabel independen

3.8.2.4. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi Berganda digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018:95), analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linier berganda akan menguji seberapa besar pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Leverage terhadap Manajemen Laba

Analisis regresi linier berganda dilakukan setelah menguji uji asumsi klasik karena memastikan terlebih dahulu apakah model tersebut tidak terdapat masalah normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k$$

Keterangan:

Y = Nilai prediksi dari Variabel Dependen

a = Konstanta

b₁ b₂ b_k = Koefisien variabel bebas

X₁ X₂ X_k = Variabel Independen

3.8.2.5. Analisis Koefisien Korelasi (R)

Menurut Ghozali (2018:95) analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *Perason Product Moment* (r). Menurut Sugiyono (2018: 183) teknik korelasi adalah:

“... teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah semua.”

Rumus korelasi *Pearson Product Moment* (r) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = Koefisien korelasi
 X = Variabel independen
 Y = Variabel dependen
 n = Banyaknya sampel

Dari hasil yang diperoleh dengan rumus di atas, dapat diketahui tingkat pengaruh variabel independen yaitu aset pajak tangguhan dan leverage. Kemudian variabel dependen yaitu manajemen laba. Korelasi PPM (*Pearson Product Moment*) dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r dapat bervariasi dari -1 hingga +1 atau secara sistematis dapat ditulis menjadi $-1 \leq r \leq +1$.

Hasil dari perhitungan akan memberikan tiga alternative, yaitu:

1. Bila $r = 0$ atau mendekati 0, maka korelasi antar kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila $r = +1$ atau mendekati +1, maka korelasi antar kedua variabel dikatakan positif
3. Bila $r = -1$ atau mendekati -1, maka korelasi antar kedua variabel dikatakan negatif.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisiensi korelasi yang ditemukan besar atau kecil maka dapat berpedoman pada ketentuan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi
Kategori Koefisiensi Korelasi Bernilai r Positif

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2018:184)

Tabel 3.12
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi
Kategori Koefisiensi Korelasi Bernilai r Negatif

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – -0,199	Sangat Rendah
-0,20 – -0,399	Rendah
-0,40 – -0,599	Sedang
-0,60 – -0,799	Kuat
-0,80 – -1,000	Sangat Kuat

Sumber: Data diolah Penulis

3.8.2.6. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh sejauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Dalam penerapannya, koefisien determinasi menurut Sugiyono (2018:292) dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien determinasi yang dikuadratkan

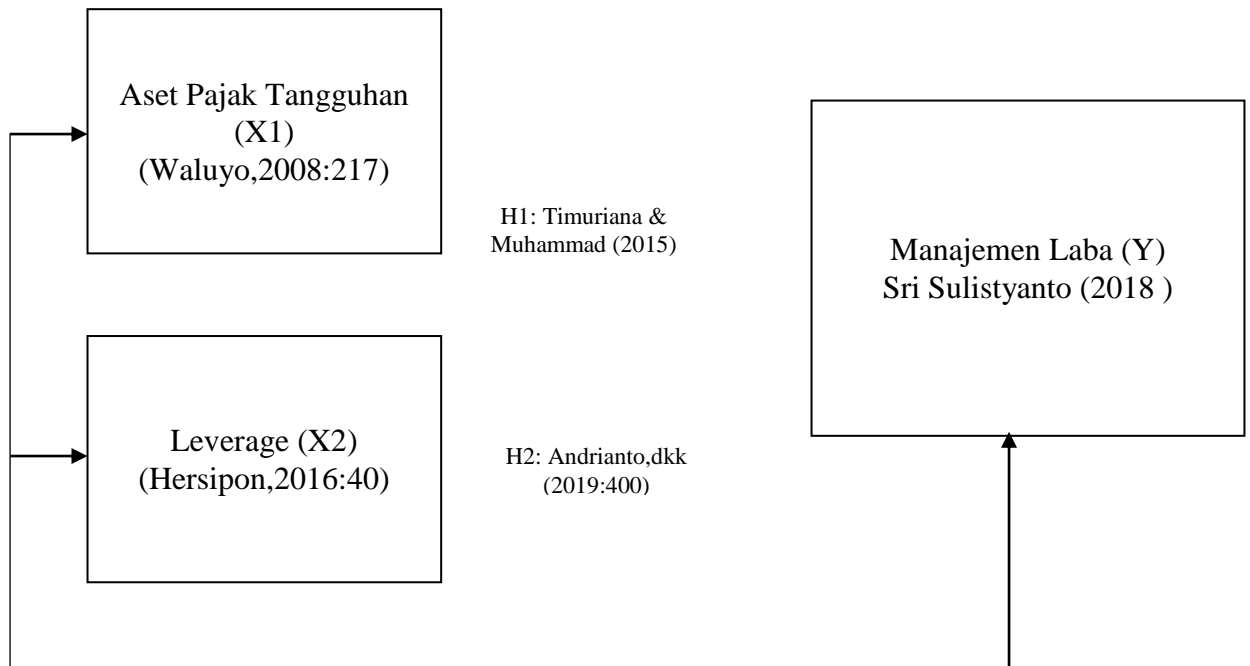
Semakin kecil nilai r^2 menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai r^2 semakin besar berarti informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen hampir seluruhnya dapat diberikan oleh variabel independen.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu aset pajak tangguhan, dan leverage terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan *IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

3.9 Model Penelitian

Dalam sebuah penelitian, model penelitian merupakan abstrak dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu

untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan dan leverage terhadap manajemen laba. Model penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3.1
Model Penelitian